

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang memiliki surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauann lingkungan hidup (SPPL) sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan hidup di Kota Yogyakarta belum berjalan sesuai amanat yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan terkait. Pengawasan hanya akan dilakukan apabila ada laporan khusus terkait usaha yang telah memiliki SPPL.
2. Belum berjalannya pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang memiliki SPPL terkendala beberapa faktor berikut:
 - a. Minimnya SDM yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta sehingga tidak mampu menjalankan pengawasan terhadap seluruh pelaku usaha yang memiliki dokumen SPPL.
 - b. Alokasi anggaran dirasa kurang memadai untuk menjalankan seluruh tugas dengan optimal.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, penulis memberikan saran agar Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta perlu mulai melakukan pengawasan terhadap kewajiban-kewajiban pelaku usaha yang memiliki SPPL di Kota Yogyakarta sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, atau setidaknya mulai menjalankan kewajiban pelaporan hasil pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup setiap enam bulan bagi setiap pelaku usaha yang memiliki SPPL sebagai bentuk pengawasan tidak langsung sesuai amanat Pasal 14 ayat (2) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2013 tentang Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Bambang Sunggono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2019, *Kota Yogyakarta dalam Angka 2019*, BPS Kota Yogyakarta, Yogyakarta
- Fakultas Hukum UAJY, 2019, *Pedoman Penulisan Hukum (Skripsi dan Legal Memorandum)*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Hyronimus Rhiti, 2005, *Kompleksitas Permasalahan Lingkungan Hidup*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Marhaeni Ria Siombo, 2012, *Hukum Lingkungan & Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Muhamad Erwin, 2008, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Otto Soemarwoto, “Permasalahan Lingkungan Hidup”, dalam Prosiding oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1977, *Seminar Segi-segi Hukum dari Pengelolaan Lingkungan Hidup*, dilaksanakan di Bandung, tanggal 25-27 Maret 1976, Penerbit Binacipta, Jakarta.
- Sujamto, 1990, *Otonomi Daerah Yang Nyata dan Bertanggung Jawab*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Syamsul Arifin, 2012, *Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*, P.T. Sofmedia, Jakarta.
- Syahrul Machmud, 2012, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Takdir Rahmadi, 2011. *Hukum Lingkungan di Indinesia*, PT RajaGrafindo Persada, Depok.
- Viktor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, 1998. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.

Internet:

Anwar Hidayat, Penjelasan Teknik Purposive Sampling Lengkap Detail, dalam, <https://www.statistikian.com/2017/06/penjelasan-teknik-purposive-sampling.html>, diakses 5 September 2019.

Badan Pusat Statistik, 2017, Hasil Pendaftaran Usaha/Perusahaan Sensus Ekonomi 2016, Badan Pusat Statistik, Jakarta. Dalam https://se2016.bps.go.id/umkumb/files/buku/00_Indonesia.pdf, diakses 10 April 2019.

Dinas Lingkungan Hidup, Buku Profil DLH Kota Yogyakarta. Dalam https://drive.google.com/file/d/1o4sQ8S_Vbs9s6O8z34teyM0Zg6IVuLcT/view, diakses 22 Maret 2019.

Etih Henriyani, 2018, “Pengawasan Masyarakat Dan Kinerja Birokrasi Pemerintah” dalam <http://dlh.probolinggakab.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/>, diakses 19 maret 2019.

<https://kbbi.web.id/pengawasan>, diakses 18 Maret 2019.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.25/ /MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup. Dalam <http://pslh.ugm.ac.id/id/wp-content/uploads/P.25-2018-UKL-PL.pdf>, diakses 22 April 2019

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan, dalam <http://pelayanan.jakarta.go.id/download/regulasi/permen-lingkungan-hidup-nomor-16-tahun-2012-tentang-pedoman-penyusunan-dokumen-lingkungan-hidup.pdf>, diakses 24 April 2019.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan Dokumen Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan, dalam <https://mantrijeronkec.jogjakota.go.id/resources/instansi/mantrijeronkec/files/%EF%83%98-peraturan-walikota-yogyakarta-nomor-9-tahun-2016-tentang-pet-181.pdf>, diakses 22 Maret 2019.

Provinsi DIY, Jumlah penduduk menurut jenis kelamin semester II 2018, dalam <https://kependudukan.jogjaprovo.go.id/olah.php?module=statistik>, diakses 15 Mei 2019.

Sudiyana, dkk. 2017. Sensus Ekonomi 2016 Analisis Listing Potensi Ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta. Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Yogyakarta.
<https://yogyakarta.bps.go.id/publication.html?Publikasi%5BtahunJudul%5D=2016&Publikasi%5BkataKunci%5D=mikro&yt0=Tampilkan>, diakses pada 10 april 2019.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059 dalam <http://jdih.menlh.go.id>, diakses hari selasa, 5 maret 2019

Peraturan perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059 Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.25/ /MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 929. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 990. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 1. Sekretariat Kota Yogyakarta.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2013 tentang Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 7. Sekretariat Daerah Yogyakarta.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan Dokumen Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan, Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 6. Sekretariat Kota Yogyakarta.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Bimasakti No. 1 Yogyakarta Kode Pos : 55221 Telp.dan Fax (0274) 515876
EMAIL : lingkunganhidup@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id + JSS
WEBSITE : lingkunganhidup.jogjakota.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070/005./S.KET/IX/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Suyana
NIP : 19630910 199003 1 008
Jabatan : Kepala DLH Kota Yogyakarta

Menerangkan bahwa, Mahasiswa Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup, Fakultas Hukum , Universitas Atma Jaya Yogyakarta, atas nama:

Nama : Tri Haryono Patria Mangambe
NIM : 160512459
Universitas : Atma Jaya Yogyakarta

Telah selesai melakukan penelitian dengan judul Proposal Pengawasan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pelaku Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Memiliki Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) Sebagai Upaya Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kota Yogyakarta, di Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta. Dan yang bersangkutan saat ini **tidak mempunyai tanggungan apapun** di Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, September 2019


IR. SUYANA
NIP. 196309101990031008



SEGORO AMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYAKARTA
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN

Nomor : 063/B-I/WY/X/2019

Hal :

Lampiran : -

Kepada Yth.

Dr-Triyana Yohanes, SH., M. Hum

Dekan 1 Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya

Di tempat

Salam Adil dan Lestari,

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas karunia yang telah diberikan kepada kita semua sehingga dapat menjalankan aktifitas keseharian dengan baik.

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Halik Sandera

Jabatan : Direktur Eksekutif WALHI Yogyakarta

Dengan ini menerangkan mahasiswa tersebut sebagai berikut:

| NO | NAMA | NIM |
|----|-----------------------------|----------|
| 1 | Tri Haryono Patria Mangambe | 16051259 |

Jurusan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup

Mahasiswa yang bersangkutan telah selesai melakukan Wawancara di WALHI Yogyakarta dengan Judul Skripsi " Pengawasan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pelaku Usaha dan/atau Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) Sebagai Upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kota Yogyakarta", pada Selasa, 15 Oktober 2019.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 17 Oktober 2019

Hormat kami,


Halik Sandera
Direktur Eksekutif